

DISERTASI

**MODEL RELASI KEKUASAAN DALAM PROGRAM
BANTUAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN: ANALISIS
TIGA DIMENSI KEKUASAAN DAN *NARRATIVE
POLICY FRAMEWORK* DALAM PROGRAM
INDONESIA PINTAR DI KOTA PALEMBANG**



**STEPANUS SUPARDI
NIM:07013682025002**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN DISERTASI

Judul Disertasi : Relasi Kekuasaan dalam Program Bantuan Pembiayaan Pendidikan: Analisis Tiga Dimensi Kekuasaan dan *Narrative Policy Framework* dalam Program Indonesia Pintar di Kota Palembang

Nama Mahasiswa : **STEPANUS SUPARDI**

NIM : **07013682025002**

Program Studi : Doktor Administrasi Publik

Menyetujui :

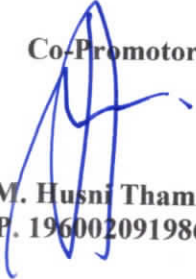
Promotor


Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
NIP. 19660122 199003 1 004

Co-Promotor I,

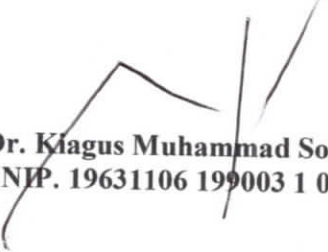

Prof. Dr. Slamet Widodo, M.S., M.M
NIP. 1196406061001

Co-Promotor II,


Dr. M. Husni Thamrin, M.Si.
NIP. 196002091986031004

Mengetahui,

Koordinator Program Studi
Doktor Administrasi Publik


Prof. Dr. Klagus Muhammad Sobri, M.Si.
NIP. 19631106 199003 1 001

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
NIP. 19660122 199003 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

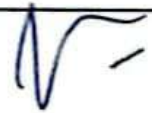
Judul Disertasi : Relasi Kekuasaan dalam Program Bantuan Pembiayaan Pendidikan: Analisis Tiga Dimensi Kekuasaan dan *Narrative Policy Framework* dalam Program Indonesia Pintar di Kota Palembang

Nama : STEPANUS SUPARDI

NIM : 07013682025005

Program Studi : Doktor Administrasi Publik

Tanggal Ujian : 07 Maret 2025

NO	NAMA DOSEN	TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
1	PROF. DR. ALFITRI, M.Si.	KETUA	1 
2	PROF. DR. SLAMET WIDODO MS	SEKRETARIS	2 
3	PROF. DR. PAULUS ISRAWAN SETYOKO, M.S.	ANGGOTA	3 
4	PROF. DR. KGS. M. SOBRI, M.Si.	ANGGOTA	4 
5	DR. M. HUSNI THAMRIN, M. Si.	ANGGOTA	5 
6	DR. ANDRIES LIONARDO, M. Si.	ANGGOTA	6 
7	DR. IR. ABDUL NAJIB, M.M.	ANGGOTA	7 

Koordinator Program Studi
Doktor Administrasi Publik


Prof. Dr. Klags Muhammad Sobri, M.Si.
NIP. 19631106 199003 1 001

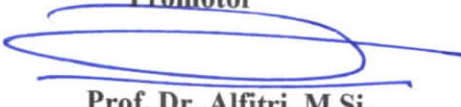
ABSTRAK

Disertasi ini berfokus pada analisis model relasi kekuasaan dalam program bantuan pembiayaan pendidikan melalui analisis tiga dimensi *Narrative Policy Framework* (NPF) dan teori kekuasaan Steven Lukes. Studi ini berkonsentrasi pada pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kota Palembang yang bertujuan untuk memberikan akses kesempatan pendidikan yang layak kepada kelompok masyarakat kurang. Hasil analisis menunjukkan bahwa persepsi publik dan pelaksanaan program sangat dipengaruhi oleh narasi kebijakan. Studi ini menunjukkan hasil dari pengolahan data melalui tiga dimensi kekuasaan yang digunakan: pengambilan keputusan, pengendalian agenda, dan manipulasi keinginan. Selain itu, bagaimana narasi kebijakan dibuat untuk membantu program berjalan dengan baik. Hasil dari penelitian dapat menjadi rekomendasi dan informasi informasi praktis kepada pembuat kebijakan tentang cara meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan akses pendidikan. Untuk memahami dinamika kebijakan pendidikan di Indonesia, integrasi antara teori NPF dan teori kekuasaan Steven Lukes memberikan pandangan multidimensional yang berguna.

Kata kunci: Program Indonesia Pintar, Tiga Dimensi Kekuasaan, *Narrative Policy Framework*

Menyetujui :

Promotor


Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
NIP. 19660122 199003 1 004

Co-Promotor I,


Prof. Dr. Slamet Widodo, M.S., M.M
NIP. 1196406061001

Co-Promotor II,


Dr. M. Husni Thamrin, M.Si.
NIP. 196002091986031004

ABSTRAK

Disertasi ini berfokus pada analisis model relasi kekuasaan dalam program bantuan pembiayaan pendidikan melalui analisis tiga dimensi *Narrative Policy Framework* (NPF) dan teori kekuasaan Steven Lukes. Studi ini berkonsentrasi pada pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kota Palembang yang bertujuan untuk memberikan akses kesempatan pendidikan yang layak kepada kelompok masyarakat kurang. Hasil analisis menunjukkan bahwa persepsi publik dan pelaksanaan program sangat dipengaruhi oleh narasi kebijakan. Studi ini menunjukkan hasil dari pengolahan data melalui tiga dimensi kekuasaan yang digunakan: pengambilan keputusan, pengendalian agenda, dan manipulasi keinginan. Selain itu, bagaimana narasi kebijakan dibuat untuk membantu program berjalan dengan baik. Hasil dari penelitian dapat menjadi rekomendasi dan informasi informasi praktis kepada pembuat kebijakan tentang cara meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan akses pendidikan. Untuk memahami dinamika kebijakan pendidikan di Indonesia, integrasi antara teori NPF dan teori kekuasaan Steven Lukes memberikan pandangan multidimensional yang berguna.

Kata kunci: Program Indonesia Pintar, Tiga Dimensi Kekuasaan, *Narrative Policy Framework*

Menyetujui :

Promotor



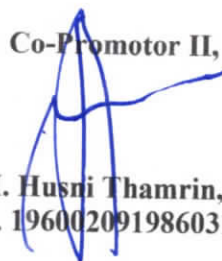
Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
NIP. 19660122 199003 1 004

Co-Promotor I,



Prof. Dr. Slamet Widodo, M.S., M.M.
NIP. 1196406061001

Co-Promotor II,



Dr. M. Husni Thamrin, M.Si.
NIP. 196002091986031004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan elemen vital dalam pembangunan nasional karena memainkan peran kunci dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Adanya sumber daya manusia berkualitas akan mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan kemajuan budaya suatu negara. Di Indonesia pendidikan dianggap sebagai hak dasar setiap warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 31. Pada pasal 31 dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Indonesia saat ini telah mulai mengutamakan pendidikan sebagai hak dasar warga negara yang harus terpenuhi (MK, 2009). Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal akses dan kualitas pendidikan, terutama bagi kelompok yang kurang mampu (Zamjani et al., 2023).

Salah satu tantangan utama adalah ketidakmerataan akses pendidikan yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat partisipasi sekolah telah meningkat, tetapi masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan menengah untuk anak usia 16-18 tahun pada tahun 2021 berada di angka sekitar 84% di perkotaan, sedangkan di pedesaan hanya 72%. Hal ini mencerminkan tantangan infrastruktur dan ketersediaan fasilitas pendidikan yang tidak merata sehingga menimbulkan dampak ketidaksetaraan akses pendidikan (Unit Riset Sekretariat TNP2K, 2022).

Kualitas pendidikan juga memegang peran penting dalam meningkatkan pendidikan. Laporan PISA (*Programme for International Student Assessment*) 2018 yang dirilis oleh OECD menunjukkan bahwa performa siswa Indonesia dalam hal literasi, matematika, dan sains masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara lain. Skor rata-rata Indonesia untuk literasi hanya 371. Angka ini

masih jauh di bawah rata-rata OECD yang mencapai 487. Faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas pendidikan ini antara lain kurangnya kualitas guru, rendahnya tingkat kompetensi siswa, kurangnya fasilitas, dan sumber daya pendidikan yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil (OECD, 2019).

Guru sangat memainkan peran penting dalam proses belajar mengajar. Sehingga keterampilan dan keahlian guru sangat berpengaruh dalam proses belajar siswa di kelas. Realita yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa masih kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru menyebabkan masalah yang signifikan (Zamjani et al., 2023). Hambatan terhadap akses terhadap pelatihan berkualitas juga terbatas terutama bagi guru-guru di daerah terpencil (Kementerian Keuangan, 2023; OECD, 2019). Menurut data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2020, hanya sekitar 70% guru di Indonesia yang memenuhi syarat kualifikasi minimum yaitu sarjana (S1) atau diploma IV. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah siswa yang mencapai 54 juta lebih.

Faktor ekonomi juga menjadi pendorong terhambatnya akses pendidikan bagi anak-anak di Indonesia. Anak-anak dari keluarga miskin seringkali harus berhenti sekolah lebih awal untuk bekerja membantu perekonomian keluarga. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan bahwa pada tahun 2020 sekitar 4,5 juta anak usia sekolah (7-18 tahun) tidak melanjutkan pendidikan karena alasan ekonomi (Adji, Asmanto, et al., 2022). Program-program bantuan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) telah diperkenalkan untuk mengatasi masalah ini. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan termasuk dalam hal distribusi dan efisiensi penggunaan dana (Syukri et al., 2023a).

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini. Salah satu upaya yang sedang dijalankan adalah melalui Kurikulum Merdeka yang diperkenalkan pada tahun 2021. Kurikulum ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dan relevansi pendidikan. Peningkatan anggaran pendidikan hingga 20% dari APBN setiap tahunnya juga telah dilakukan untuk menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pendidikan di Indonesia. Namun,

tantangan besar terjadi dalam hal pelaksanaan kebijakan yang efektif dan pemantauan kualitas pendidikan di semua Tingkat (Kemeterian Keuangan, 2023).

Pada konteks pembangunan nasional pendidikan bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan, tetapi juga mempersiapkan generasi muda untuk menjadi warga negara yang produktif dan berdaya saing global. Tantangan akses dan kualitas pendidikan masih menghalangi langkah Indonesia untuk lebih maju. Kelompok masyarakat kurang mampu terus diupayakan untuk dapat mengakses pendidikan berkualitas yang mereka butuhkan untuk berkembang (Wilhelm et al., 2021). Melalui Program Indonesia Pintar (PIP) pemerintah mencoba mengupayakan akses pendidikan di Indonesia dapat dirasakan oleh masyarakat kurang mampu.

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu inisiatif strategis yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Program ini secara resmi diperkenalkan sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk mencapai pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Hal ini sejalan dengan amanat UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. PIP dirancang untuk memberikan bantuan pembiayaan pendidikan yang dapat mengurangi hambatan ekonomi yang sering kali menjadi penghalang utama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan mereka (Pusdatin Kesos, 2022).

Tujuan utama dari PIP adalah meningkatkan partisipasi sekolah anak-anak dari keluarga miskin, yatim piatu, dan kelompok rentan lainnya. Program ini berfokus pada anak-anak usia sekolah dasar hingga menengah atas yang sering kali menghadapi risiko putus sekolah akibat kesulitan ekonomi. Melalui program ini pemerintah memberikan bantuan tunai yang dapat digunakan untuk keperluan pendidikan seperti membeli perlengkapan sekolah, seragam, buku, serta membayar biaya transportasi (Kemendikbud, 2020; Kementerian PPN/BAPPENAS, 2021)

Secara operasional PIP diimplementasikan melalui kerjasama antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Sosial. Selain mendapat dukungan dari kementerian, program ini juga melibatkan pemerintah daerah berguna untuk memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran. Data penerima manfaat PIP diambil dari basis data terpadu yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) yang mencakup anak-anak dari keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (Ahmad, 2021a; Pusdatin Kesos, 2022).

Agenda rencana pembangunan Indonesia dalam Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 memiliki salah tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi diperlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak. Beberapa program dan kebijakan telah dilakukan seperti peningkatan anggaran pendidikan hingga 20% dari APBN setiap tahun. Alokasi anggaran yang digunakan untuk program PIP ini terbagi sesuai dengan jenjang pendidikan mulai dari SD – SMA/SMK. Total siswa yang terdaftar sebagai penerima PIP sebanyak 11.308.246 siswa atau 61,8% dari total alokasi. Inisiatif pemerintah Indonesia melalui program PIP telah berhasil menjangkau jutaan siswa di seluruh Indonesia, memberikan mereka akses yang lebih baik ke pendidikan dasar dan menengah. Penyaluran bantuan pendidikan paling tinggi diperuntukan untuk siswa SD, sedangkan angka penyaluran kepada siswa SMK rendah.

Tabel 1.1. Anggaran Program Indonesia Pintar tahun 2019-2022

Jenjang Pendidikan	2024	2023	2022
SD	4.212.276.300.000	4.212.276.300.000	4.212.276.300.000
SMP	2.711.107.500.000	2.711.107.500.000	2.711.107.500.000

SMA	3.226.524.300.000	1.175.672.500.000	1.175.672.500.000
SMK	3.297.802.500.000	1.529.167.000.000	1.529.167.000.000

Sumber: Kemendikbud

Pelaksanaan PIP dijalankan dengan mengacu pada beberapa peraturan yang telah dituangkan dalam bentuk undang-undang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan pendidikan disalurkan dengan tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap tahapan yang dilalui mulai dari identifikasi penerima manfaat hingga pendistribusian bantuan diawasi oleh berbagai instansi pemerintah untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Sehingga dapat memperkecil kemungkinan adanya penyimpangan dalam proses implementasi program.

Proses implementasi program yang harus melalui beberapa tahapan menimbulkan tantangan tersendiri. Tantangan yang dihadapi cukup beragam, seperti distribusi dana yang tidak merata, kurangnya sosialisasi kepada penerima manfaat, dan kendala administratif lainnya yang sering kali menghambat efektivitasnya (Kemdikbud, 2020). Beberapa studi menunjukkan bahwa tidak semua penerima bantuan benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan dan ada juga masalah dalam hal pencairan dana yang terkadang terlambat atau tidak mencapai target yang ditentukan (Dimmera & Purnasari, 2020a).

Tantangan dalam PIP menjadi tugas tambahan bagi pemerintah untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki mekanisme distribusi untuk memastikan efektivitas PIP dapat terwujud. Langkah-langkah perbaikan terus dilakukan termasuk penyempurnaan mekanisme distribusi dana, peningkatan transparansi, dan pengawasan yang lebih ketat dalam pelaksanaan program. Sebagai program nasional PIP tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatasi ketidaksetaraan akses pendidikan, tetapi juga sebagai fondasi dalam membangun generasi masa depan yang lebih kompetitif dan berdaya saing tinggi di pasar global. Inisiatif ini

sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menciptakan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat, khususnya mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu (Junius Lengkong et al., 2024a).

PIP telah berjalan lebih dari sepuluh tahun. Pada laporan tahun 2019 terdapat beberapa provinsi yang menerima bantuan PIP terbanyak. Provinsi yang mendapatkan penyaluran bantuan PIP terbanyak itu adalah Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Banten, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Selatan (Retnaningsih, 2019). Tingginya jumlah penerima manfaat di provinsi-provinsi tersebut mencerminkan kebutuhan akan intervensi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks Kota Palembang, pelaksanaan PIP tidak hanya dipengaruhi oleh aspek administratif dalam penyaluran bantuan, tetapi juga oleh narasi kebijakan yang membentuk persepsi publik dan efektivitas program.

Kota Palembang sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki dinamika sosial-ekonomi. Menurut Rencana Induk Kelitbangan 2024-2029 Kota Palembang memiliki permasalahan diantaranya menurunnya kualitas air sungai Musi, pengelolaan sampah, dan rumah singgah bagi anak jalanan. Pada gambar 1.2 menunjukkan jumlah penduduk miskin mengalami penurunan per tahun mulai tahun 2015 – 2018, kemudian kembali mengalami peningkatan tahun 2019-2021, setelah itu mengalami penurunan kembali hingga mencapai angka 173,59 jiwa pada tahun 2024 (BPS, 2024).



Gambar 1.2. Presentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Palembang 2015-2024
(BPS, 2024)

Meskipun Kota Palembang mengalami penurunan jumlah penduduk miskin hal ini tidak menjadikan permasalahan pendidikan tidak ada. Permasalahan rumah singgah masih menjadi salah satu target penyelesaian prioritas pemerintah Kota Palembang. Maraknya keberadaan anak jalanan yang berkonotasi negatif bagi negatif membuat keberadaannya tidak diterima baik. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan justru harus menjadi pengamen jalanan dan tidak memiliki tempat tinggal yang jelas.

Tabel 1.3. Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar Kota Palembang tahun 2021-2024

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni			Angka Partisipasi Kasar		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
SD	93,30	97,85	97,98	107,96	111,05	109,35
SMP	69,62	75,10	79,52	90,37	79,64	90,34
SMA	62,74	62,29	66,13	102,30	95,66	88,03

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kota Palembang

Pada tabel 1.3 memperlihatkan capaian tingkat pendidikan di Kota Palembang dalam kurun waktu 2021-2024. Pada tingkat SD capaian selalu stabil mendekati seratus persen. sedangkan pada jenjang SMP dan SMA angka capaian masih belum memenuhi target partisipasi yang diharapkan. Capaian tingkat pendidikan di Kota Palembang menjadi tantangan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat memberikan peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Pada beberapa studi menunjukkan bahwa tidak semua penerima bantuan benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan, dan ada juga masalah dalam hal pencairan dana yang terkadang terlambat atau tidak mencapai target yang ditentukan (Dimmera & Purnasari, 2020b). Selain itu kurangnya sosialisasi kepada penerima manfaat, dan kendala administratif lainnya yang sering kali menghambat efektivitasnya (Kemendikbud, 2020). Tantangan yang masih dihadapi Indonesia dalam hal akses dan kualitas pendidikan, terutama bagi kelompok yang kurang mampu, diperlukan upaya yang lebih terkoordinasi dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia dapat mengakses pendidikan berkualitas yang mereka butuhkan untuk berkembang (Wilhelm et al., 2021).

PIP sebagai salah satu inisiatif pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam akses pendidikan di kalangan masyarakat kurang mampu. Program ini dirancang untuk memberikan bantuan dana pendidikan kepada siswa dari keluarga prasejahtera agar mereka dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa terhambat oleh biaya. Dalam beberapa tahun terakhir, PIP telah berhasil menjangkau jutaan siswa di seluruh Indonesia, memberikan mereka akses yang lebih baik ke pendidikan dasar dan menengah.

Program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Langkah-langkah perbaikan tersebut termasuk penyempurnaan mekanisme distribusi dana, peningkatan transparansi, dan pengawasan yang lebih ketat dalam pelaksanaan program. PIP tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatasi ketidaksetaraan akses pendidikan, tetapi juga sebagai fondasi dalam membangun generasi masa depan yang lebih kompetitif dan berdaya saing tinggi di pasar global. Inisiatif ini

sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menciptakan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat, khususnya mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu (Junius Lengkong et al., 2024b)

Penelitian-penelitian mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) di Indonesia sebagian besar berfokus pada *outcome* pendidikan seperti angka partisipasi sekolah, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan dampak terhadap kemiskinan (Syukri et al., 2023b). Penelitian yang dilakukan sebelumnya cenderung mengukur keberhasilan PIP melalui indikator kuantitatif. Contohnya tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang tertentu atau perubahan kondisi sosial-ekonomi penerima bantuan. Selain itu, beberapa penelitian juga membahas ketepatan sasaran penerima bantuan (Zamjani, 2019b) dan efektivitas teknis dalam implementasi program, seperti mekanisme distribusi dana dan penggunaan teknologi untuk validasi penerima.

Studi yang mengeksplorasi interaksi dan dinamika antar aktor dalam desain kebijakan PIP dan bagaimana masukan dari berbagai pihak digunakan untuk perbaikan kebijakan, masih sangat terbatas. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam literatur mengenai aspek proses kebijakan PIP. Untuk menjawab kekurangan ini penggunaan kerangka *Narrative Policy Framework* (NPF) dan Teori Tiga Dimensi Kekuasaan Steven Lukes dapat menjadi pendekatan yang relevan. Karena kedua teori tersebut mampu menganalisis bagaimana narasi kebijakan dibentuk, bagaimana kekuasaan mempengaruhi dinamika antar aktor, serta bagaimana preferensi dan keputusan dalam desain kebijakan dipengaruhi oleh struktur sosial dan dominasi tertentu.

Narrative Policy Framework (NPF) adalah pendekatan teoretis yang digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan publik dibentuk, dipersepsikan, dan diimplementasikan melalui narasi yang dibangun oleh berbagai aktor dalam proses kebijakan (Ertas & McKnight, 2020a). Teori ini diperkenalkan oleh Jones dan McBeth (2010), NPF menawarkan pendekatan sistematis dan kuantitatif untuk memahami peran narasi dalam politik dan kebijakan public (Jones & McBeth, 2020). NPF beroperasi melalui empat elemen utama: *setting*, *character*, *moral of the story*, dan *plot*. Setting memberikan konteks sosial, ekonomi, atau

politik di mana narasi berlangsung. Karakter mengacu pada aktor dalam narasi, seperti pahlawan (*heroes*), penjahat (*villains*), dan korban (*victims*). Karakter ini yang menggambarkan peran aktor-aktor kebijakan seperti pemerintah, masyarakat, atau kelompok kepentingan (Terlizzi, 2021a). *Moral of the story* adalah pesan yang ingin disampaikan, seperti solidaritas sosial dalam narasi pengentasan kemiskinan. *Plot* menggambarkan alur cerita dari pengenalan masalah, ketegangan antaraktor, hingga resolusi yang menunjukkan dinamika kekuasaan dan konflik dalam proses kebijakan

Keunggulan NPF terletak pada kemampuannya menjembatani analisis kualitatif dan kuantitatif serta memberikan wawasan lintas kasus dan waktu. Pada penerapannya di Indonesia NPF dapat digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dibentuk dan dipersepsikan oleh berbagai aktor. Sebagai contoh, pemerintah dapat digambarkan sebagai pahlawan dalam narasi resmi yang mempromosikan PIP, sementara media atau masyarakat mungkin menyoroti tantangan implementasi sebagai bagian dari *plot* yang lebih kompleks. Analisis seperti ini membantu mengeksplorasi bagaimana narasi memengaruhi persepsi publik dan implementasi kebijakan di tingkat nasional maupun lokal, dan memberikan dasar bagi rekomendasi perbaikan kebijakan (Ertas & McKnight, 2020a; Peterson et al., 2020).

Pelaksanaan PIP tidak hanya bergantung pada prosedur administratif dan organisasional, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan dan narasi yang dibangun oleh berbagai aktor kebijakan. Pada studi kebijakan publik konsep kekuasaan masih belum mendapatkan perhatian yang mendalam. Beberapa penelitian yang muncul pada akhir 1980-an dan awal 1990-an beberapa penelitian mulai mengkaji peran kekuasaan dalam proses kebijakan, namun fokus terhadap aspek tersebut mengalami penurunan dalam beberapa dekade ini (Herweg et al., 2018). Beberapa penelitian masih ada yang membahas mengenai kekuasaan secara umum, seperti penelitian yang dilakukan oleh Cook (2010). Penelitian tersebut membahas bahwa teori kebijakan yang ada masih kurang mengakomodasi analisis kekuasaan secara mendalam. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam memahami

bagaimana aktor-aktor dalam kebijakan menggunakan kekuasaan mereka untuk memengaruhi hasil kebijakan.

Teori yang menyentuh aspek kekuasaan, tetapi belum secara eksplisit seperti teori yang dikembangkan oleh Weible dan Sabatier (2018). Teori ini mengasumsikan bahwa adanya sistem pluralis yang mengakui keberagaman aktor dalam proses kebijakan, namun tidak menguraikan secara spesifik bagaimana kekuasaan didistribusikan dan digunakan (Weible, 2017). Pendekatan lainnya seperti *Social Construction and Policy Design Framework* membahas bagaimana peran aktor kebijakan membentuk persepsi public terhadap kelompok tertentu, tetapi kurang menyoroti bagaimana operasionalnya secara konkrit (Schneider & Ingram, 2005).

Kesenjangan dalam kajian kekuasaan ini dapat diatasi dengan menggunakan perspektif yang lebih sistematis dan dapat memahami kompleksitas dinamika kebijakan maka penelitian ini menggunakan kerangka Teori Tiga Dimensi Kekuasaan Steven Lukes (Lukes, 2005) untuk menganalisis bagaimana kekuasaan dijalankan oleh aktor politik dan sosial. Kerangka ini memberikan pendekatan komprehensif yang mencakup tiga dimensi kekuasaan: pengambilan keputusan (*decision-making*), pengendalian agenda (*non-decision-making*), dan manipulasi keinginan (*shaping desires*) (Ertas & McKnight, 2020a; Jenkins & Gaventa, 1982a).

Dimensi pertama, yaitu pengambilan keputusan. Pada dimensi ini mencerminkan kekuasaan yang terlihat secara eksplisit dalam proses pembuatan kebijakan. Pada konteks PIP hal ini terlihat pada keputusan tentang alokasi sumber daya, distribusi dana, dan kriteria seleksi penerima manfaat. Pemerintah daerah dan instansi terkait seperti Dinas Pendidikan dan Bappeda memiliki kekuasaan signifikan dalam menentukan implementasi kebijakan ini (Hunter, 1953a; Livernash, 1963a). Keputusan ini sering kali mencerminkan kepentingan aktor formal, seperti pejabat pemerintah dan pimpinan lembaga pendidikan yang dapat menciptakan ketimpangan dalam distribusi manfaat jika proses pengambilan keputusan tidak melibatkan kelompok masyarakat yang lebih luas (Domhoff, 2005a).

Dimensi kedua adalah pengendalian agenda. Pengendalian agenda mencakup kemampuan aktor kuat untuk menentukan isu-isu yang dibahas atau diabaikan dalam proses kebijakan. Dalam pengimplementasian PIP pengendalian agenda terlihat ketika isu-isu penting, seperti transparansi penggunaan dana dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan penerima manfaat, diabaikan oleh aktor tertentu (Bachrach & Baratz, 1962; Lukes J. Allen, 1974). Bachrach dan Baratz menunjukkan bahwa kekuasaan sering kali dijalankan dengan cara memastikan bahwa hanya isu-isu yang mendukung kepentingan aktor kuat yang dibahas dalam agenda kebijakan. Jika kekhawatiran seperti potensi penyalahgunaan dana PIP tidak pernah masuk dalam agenda resmi. Maka hal ini menunjukkan adanya pengendalian agenda oleh pihak yang memiliki kepentingan tertentu (Bachrach & Baratz, 1962).

Dimensi ketiga, yaitu manipulasi keinginan. Bentuk kekuasaan yang paling subtil dan sulit terdeteksi. Manipulasi ini melibatkan kemampuan aktor untuk membentuk persepsi, kebutuhan, dan keinginan masyarakat sehingga mereka menerima keadaan yang sebenarnya merugikan mereka. Dalam konteks PIP, narasi yang dibangun oleh aktor dominan dapat membuat masyarakat meyakini bahwa bantuan ini adalah bentuk kedermawanan pemerintah yang tidak perlu dipertanyakan, meskipun terdapat kelemahan seperti ketidakadilan dalam distribusi bantuan (Haugaard, 2008a; Toledo, 2005). Analisis ini mengungkap bagaimana penerima manfaat mungkin merasa tidak memiliki pilihan lain selain menerima kondisi yang ada karena keinginan mereka telah dibentuk oleh narasi tertentu. Dengan menggunakan kerangka tiga dimensi kekuasaan Lukes, analisis terhadap PIP dapat mengidentifikasi bagaimana kekuasaan memengaruhi efektivitas program, serta bagaimana kebijakan ini dapat ditingkatkan untuk lebih memenuhi kebutuhan masyarakat yang dituju (Jenkins & Gaventa, 1982b; Zamjani, 2019b).

Di dalam buku *Political Spectacle and the Fate of American Schools*, Mary Lee Smith dan rekan-rekannya (2004) menggambarkan politik kebijakan pendidikan sebagai sebuah tontonan politik, "dengan sutradara, panggung, pemeran, alur cerita, dan tirai yang membatasi aksi di depan panggung—yang dapat disaksikan oleh publik—dengan apa yang terjadi di balik layar, di mana

pengambilan keputusan dan alokasi nilai sebenarnya berlangsung" (Smith-Walter et al., 2020a). Pandangan ini menunjukkan bagaimana narasi kebijakan dapat memengaruhi proses politik, baik secara eksplisit maupun implisit.

Berbagai isu kebijakan pendidikan, pendidik, pembuat kebijakan, serta pendukung dan penentang kebijakan seringkali tidak mencapai kesepakatan, termasuk dalam hal tujuan pendidikan. Ketidaksepakatan ini biasanya terwujud sebagai konflik ideologis antara kelompok-kelompok dengan pandangan berbeda yang masing-masing menggunakan narasi berbasis emosi dan bukti yang dipilih secara selektif. Di sisi lain, teori kekuasaan Steven Lukes menawarkan perspektif yang dapat melengkapi pendekatan NPF dengan memahami bagaimana kekuasaan memengaruhi proses kebijakan pendidikan. Dalam *Power: A Radical View* (1974), Lukes memperkenalkan konsep kekuasaan dalam tiga dimensi: pengambilan keputusan (*decision-making*), pengendalian agenda (*non-decision-making*), dan manipulasi keinginan (*shaping desires*). Ketiga dimensi ini memberikan kerangka untuk menganalisis bagaimana suatu keputusan dibuat, isu-isu yang diabaikan, dan bagaimana preferensi masyarakat dapat dibentuk oleh aktor-aktor kebijakan yang memiliki kekuasaan (Jenkins & Gaventa, 1982c; Lukes J. Allen, 1974).

Sebagian besar literatur penelitian kebijakan pendidikan masih berfokus pada analisis empiris tentang *outcome* sistem pembelajaran, tetapi pendekatan naratif sering kali diarahkan pada studi pengalaman personal dari siswa, guru, dan pihak lain (Clandinin & Huber, 2009). Namun, dengan mengintegrasikan NPF dan Teori Tiga Dimensi Kekuasaan Steven Lukes disertasi ini berupaya untuk mengisi kesenjangan ini dengan menawarkan analisis multidimensional terhadap hubungan antara kebijakan pendidikan dan politik. Pendekatan ini tidak hanya memberikan kejelasan konseptual, tetapi juga mampu mendorong kolaborasi lintas disiplin dan memperluas wawasan tentang bagaimana narasi kebijakan dan kekuasaan dapat memengaruhi implementasi kebijakan pendidikan. Hal ini memberikan kontribusi penting bagi literatur yang membahas persimpangan antara kebijakan pendidikan, politik, dan kekuasaan.

Terdapat dua elemen utama dari teori NPF itu sendiri, yang pertama adalah *Policy Narrative Form* (Struktur) dan *Policy Narrative Content* (Isi). *Policy Narrative Form* akan menjelaskan bagaimana manifestasi pada asumsi pada suatu kerangka narasi, sedangkan *policy narrative content* akan berpatokan pada susunan carita pada argument yang tersedia dibalik narasi kebijakan yang disusun. Jungrav-Gieorgica (2020) mengatakan bahwa kedua elemen di atas harus dapat menjelaskan dengan spesifik empat poin yang terdiri dari setting atau latar yang meliputi cakupan wilayah geografi, batas demografi, dan parameter dari karakteristik tertentu. Kemudian terdapat aktor yang terlibat pada narasi yang dibangun yang terdiri dari tokoh protagonis, antagonis, dan korban. Selain itu dari segi plot, bentuk dari sebuah NPF memiliki 3 urutan yaitu Introduksi (bagian awal), klimaks (bagian tengah), dan terakhir adalah resolusi (bagian akhir). Setiap narasi kebijakan dibentuk untuk menyampaikan sebuah solusi dari permasalahan yang ada. Maka dari itu, bentuk terakhir dari narasi kebijakan adalah nilai moral dalam bentuk solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi pada masyarakat.

Pengaplikasian kerangka Teori Tiga Dimensi Kekuasaan Steven Lukes (Haywarda & Lukesb, 2008) dan *Narrative Policy Framework* (NPF) dapat dipahami bagaimana kekuasaan memengaruhi pelaksanaan kebijakan ini. Dimensi pertama, yaitu pengambilan keputusan (*decision-making*), mencakup alokasi sumber daya, distribusi dana, dan seleksi penerima manfaat oleh pemerintah daerah dan lembaga terkait (Domhoff, 2005a; Hunter, 1953a). Dimensi kedua, pengendalian agenda (*non-decision-making*) yang melibatkan pengabaian isu-isu penting seperti transparansi atau keterlibatan masyarakat untuk melindungi kepentingan aktor tertentu (Bachrach & Baratz, 1962; Lukes, 2005). Dimensi ketiga, yaitu manipulasi keinginan (*shaping desires*) terjadi ketika narasi yang dibangun oleh aktor dominan memengaruhi persepsi masyarakat sehingga mereka menerima kondisi yang kurang adil atau tidak transparan (Haugaard, 2008a; Toledo, 2005). Dengan memahami ketiga dimensi ini, analisis PIP dapat mengungkap bagaimana kekuasaan digunakan dan memengaruhi efektivitas serta keadilan program (Gaventa, 2006; Peterson et al., 2020).

NPF berfokus pada bagaimana narasi dibangun dan digunakan oleh aktor kebijakan untuk mempengaruhi persepsi publik serta proses pengambilan kebijakan (O'Donovan, 2018a). Elemen-elemen utama NPF, seperti karakter (pahlawan, penjahat, korban), setting (konteks kebijakan), *moral of the story* (pesan yang disampaikan), dan *plot* (alur cerita), membantu memahami bagaimana kebijakan seperti PIP dipersepsikan dan mempengaruhi implementasi kebijakan di tingkat local (Ertas & McKnight, 2020a).

Di Kota Palembang narasi tentang PIP dapat digunakan untuk melegitimasi kekuasaan dalam pengambilan keputusan dan pengendalian agenda, serta membentuk persepsi publik tentang program ini (Syukri et al., 2023b). Narasi kebijakan yang dominan menentukan siapa yang dianggap layak menerima manfaat (dimensi pertama), mengontrol isu yang dibahas (dimensi kedua), dan memanipulasi keinginan masyarakat untuk menerima program tanpa mempertanyakan kekurangannya (Stankevich, 2016). Dengan mengaitkan NPF dan Tiga Dimensi Kekuasaan Lukes penelitian ini bertujuan menjawab bagaimana narasi PIP dibangun, bagaimana kekuasaan mempengaruhi implementasinya, dan bagaimana keduanya berinteraksi dalam membentuk persepsi publik.

Integrasi antara Teori Tiga Dimensi Kekuasaan Steven Lukes dan *Narrative Policy Framework* (NPF) penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kekuasaan digunakan dan narasi dibangun untuk mempengaruhi implementasi kebijakan. NPF membantu menganalisis elemen-elemen narasi, seperti karakter, *setting*, *moral of the story*, dan *plot* yang menunjukkan bagaimana kebijakan itu dibentuk, dipersepsikan, dan diimplementasikan. Sementara itu, Teori Kekuasaan Lukes memungkinkan analisis yang mendalam terhadap relasi kekuasaan, mulai dari pengambilan keputusan (*decision-making*), pengendalian agenda (*non-decision-making*), hingga manipulasi keinginan (*shaping desires*) dalam kebijakan public (Bachrach & Baratz, 1962; Gaventa, 2006).

Penelitian ini relevan untuk memahami dinamika kekuasaan yang sering kali tersembunyi dalam implementasi kebijakan. Seperti narasi yang dibangun oleh aktor kebijakan seperti pemerintah atau media dapat digunakan untuk melegitimasi kekuasaan dalam pengambilan keputusan (dimensi pertama), mengontrol isu-isu

yang dibahas atau diabaikan (dimensi kedua), dan membentuk persepsi masyarakat tentang kebijakan tersebut (dimensi ketiga) (Haugaard, 2008a; Stankevich, 2016). Dengan menggunakan pendekatan ini penelitian mampu mengidentifikasi bagaimana narasi kebijakan berinteraksi dengan relasi kekuasaan untuk memengaruhi efektivitas implementasi PIP di Kota Palembang. Sebagai contoh, narasi resmi sering kali menggambarkan pemerintah sebagai pahlawan dalam meningkatkan akses pendidikan, namun sering kali mengabaikan isu-isu transparansi atau ketidakadilan dalam distribusi manfaat (Syukri et al., 2023b; Toledo, 2005).

Penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan Teori Kebijakan Publik dengan mengintegrasikan NPF dan Teori Tiga Dimensi Kekuasaan secara bersamaan, karena kedua pendekatan ini jarang digunakan dalam literatur sebelumnya. Dengan menggunakan kedua pendekatan ini nantinya penelitian ini tidak hanya memberikan analisis mendalam tentang interaksi antara narasi dan kekuasaan, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis untuk memperbaiki implementasi kebijakan agar lebih adil dan efektif (Crow & Lawlor, 2016a; Peterson et al., 2020). Kontribusi lainnya dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi bagi metodologi studi kebijakan publik di Indonesia, khususnya dalam konteks lokal yang kompleks seperti Kota Palembang, dan menambah wawasan tentang bagaimana kebijakan sosial dapat dirancang dan diimplementasikan untuk mencapai hasil yang lebih baik bagi masyarakat yang membutuhkan (Lyon, 2021a; E. A. Shanahan, Jones, & McBeth, 2018a).

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu kebijakan strategis yang bertujuan untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Berbagai penelitian telah mengevaluasi efektivitas program ini terutama dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah dan mengurangi tingkat putus sekolah. Namun, sebagian besar penelitian yang ada masih berorientasi pada pendekatan kuantitatif, seperti analisis distribusi dana dan capaian program. Minimnya kajian yang mengeksplorasi bagaimana kebijakan ini dibingkai melalui narasi oleh aktor kebijakan dan media menunjukkan adanya celah yang perlu diteliti lebih lanjut. Dari segi teori, studi kebijakan di Indonesia masih banyak mengandalkan pendekatan *New Public Management* (NPM) yang menekankan pada efisiensi administrasi dan birokrasi. Pendekatan ini kurang menggali

bagaimana kebijakan dikonstruksi dalam wacana publik melalui narasi yang digunakan oleh pemerintah maupun media.

Penelitian mengenai peran narasi dalam membentuk persepsi dan legitimasi kebijakan masih terbatas, sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan pendekatan *Narrative Policy Framework* (NPF) dan Teori Kekuasaan Tiga Dimensi Steven Lukes untuk menganalisis bagaimana kebijakan PIP dikomunikasikan dan bagaimana kekuasaan berperan dalam implementasinya.

Metodologi yang digunakan penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih dominan menggunakan survei dan analisis statistik, meskipun mampu memberikan gambaran kuantitatif, namun kurang menangkap dinamika sosial dan politik yang terjadi dalam proses kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis naratif dan kekuasaan, dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, analisis *framing* media, serta teknik koding naratif untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam pembingkai kebijakan. Pendekatan yang dipakai membuat penelitian ini tidak hanya menelusuri bagaimana kebijakan PIP dibangun dan dikomunikasikan, tetapi juga menggali bagaimana kekuasaan digunakan dalam implementasi kebijakan.

Disertasi ini hadir sebagai bentuk kebaruan dari penelitian sebelumnya dan untuk memberikan dasar bagi para peneliti yang ingin mengembangkan dan menjalankan studi menggunakan Kerangka Kebijakan Naratif (*Narrative Policy Framework*) pada tingkat mikro, meso, atau makro dalam konteks pendidikan. Dalam memahami kompleksitas pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) dan mengeksplorasi dinamika kekuasaan serta narasi yang memengaruhi implementasinya maka diperlukan identifikasi permasalahan yang lebih mendalam. Pada tahap selanjutnya peneliti akan merumuskan rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian, sehingga analisis dapat diarahkan untuk memberikan kontribusi signifikan.

1.2. Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah yang lebih padat dan jelas:

1. Bagaimana narasi kebijakan tentang Program Indonesia Pintar (PIP) dibentuk dan dikomunikasikan oleh para aktor kebijakan?
2. Bagaimana implementasi program PIP dilihat dari perspektif tiga dimensi kekuasaan Steven Lukes?
3. Bagaimana integrasi pendekatan *Narrative Policy Framework* (NPF) dengan tiga dimensi kekuasaan Steven Lukes dapat memperjelas dinamika relasi kekuasaan dalam kebijakan PIP?
4. Bagaimana model relasi narasi kekuasaan dapat dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan PIP di Kota Palembang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis narasi kebijakan dibentuk oleh media online dan bagaimana elemen naratif dominan mencerminkan kepentingan kebijakan dan kekuasaan.
2. Mengungkapkan dinamika yang terjadi dalam kebijakan PIP melalui pendekatan NPF dan tiga dimensi kekuasaan Steven Lukes.
3. Merumuskan model relasi narasi kekuasaan dalam PIP dengan mempertimbangkan peran media dan aktor kebijakan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang signifikan baik secara teoretis maupun praktis dalam memahami interaksi antara narasi kebijakan dan kekuasaan dalam implementasi kebijakan publik, khususnya PIP.

1.4.1. Manfaat Teoretis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur terkait NPF dengan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana narasi kebijakan dibentuk oleh media online dan bagaimana elemen naratif dominan mencerminkan kepentingan kebijakan dan kekuasaan.
2. Penelitian ini akan mengembangkan pemahaman mengenai penerapan teori kekuasaan tiga dimensi Steven Lukes dalam konteks implementasi kebijakan publik, khususnya dalam memahami bagaimana kekuasaan bekerja di berbagai dimensi (terbuka, tersembunyi, dan ideologis) dalam mempengaruhi proses kebijakan dan persepsi publik.
3. Penelitian ini akan menambah pemahaman tentang bagaimana elemen-elemen naratif (*setting, character, moral of the story, dan plot*) dalam NPF bekerja bersama dengan kekuasaan dalam pengambilan keputusan, pengendalian agenda, dan manipulasi keinginan.
4. Hasil penelitian dapat membangun sebuah model integrasi teori NPF dan teori kekuasaan tiga dimensi Steven Lukes dalam konteks implementasi PIP di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan kepada para pembuat kebijakan mengenai bagaimana narasi kebijakan yang dibentuk oleh media dapat mempengaruhi persepsi publik dan efektivitas implementasi kebijakan.
2. Penelitian ini dapat memberikan panduan bagi para pelaksana kebijakan di tingkat lokal, khususnya di Kota Palembang, tentang bagaimana kekuasaan digunakan oleh aktor-aktor kunci dalam proses implementasi kebijakan.
3. Penelitian ini dapat membantu media dan lembaga komunikasi publik memahami peran mereka dalam membingkai narasi kebijakan yang mempengaruhi persepsi publik.
4. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dan aktor-aktor kunci lainnya untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam pelaksanaan PIP, termasuk meningkatkan transparansi, distribusi yang tepat sasaran, dan penerimaan publik terhadap kebijakan ini.

Dengan manfaat teoretis dan praktis ini, penelitian diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan teori, tetapi juga memberikan panduan yang relevan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, A., Asmanto, P., Nugroho, D., Chamami, A., Nursyahrizal, Nugroho, W. S., Syarifah, Z. A., Ahmad, M., Handayani, N. B., Sutikno, Fadhillah, E., Rahmawati, E., Widyastuti, L., & Tohari, A. (2022). Pemeringkatan Kesejahteraan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)-Rev. *Working Paper - TNP2K*.
- Agranoff, R., & Mcguire, M. (2003). *Collaborative Public Management*. GEORGETOWN UNIVERSITY PRESS.
- Ahmad. (2021a). Kinerja Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar (Survei Pada 6 Provinsi Indonesia). *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 19(1), 253–542.
- Ahmad Syukri, Suswanta , Ridho Al-Hamdi, D. K. (2019). Narrative Policy Framework: Analysis Of Policy Discourse For The Three-Term Presidential Term. *Journal Of Government Civil Society*, 3(September).
- Allen Rubin, E. R. B. (2015). *RESEARCH METHODS FOR SOCIAL WORK*. Cenage Learning.
- Anwaruddin, A. (2004). Pasang Surut Paradigma Administrasi Publik. *Urnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 1(2), 1–16.
- Arrow, K. J. (1964). A Strategy Of Decision: Policy Evaluation As A Social Process, *By David Braybrooke, Charles E. Lindblom. Political Science Quarterly*, 79(4), 584–588. <https://doi.org/10.2307/2146703>
- Avelino, F. (2021). Theories Of Power And Social Change. Power Contestations And Their Implications For Research On Social Change And Innovation. *Journal Of Political Power*, 14(3), 425–448. <https://doi.org/10.1080/2158379X.2021.1875307>

- Bachrach, P., & Baratz, M. S. (1962). Two Faces Of Power. *American Political Science Review*, 56(4), 947–952. <https://doi.org/10.2307/1952796>
- Bahtiar, A., & Munandar, A. I. (2021). Narrative Policy Framework (NPF) Analysis Terhadap Pelibatan Intelijen Negara Dalam Penanganan Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(2), 184–201. <https://doi.org/10.31599/jkn.v6i2.476>
- Bappenas. (2021). *Laporan Akhir Diskursus Publik Pada Ekosistem Pengetahuan Dan Inovasi*.
- Barus, E. E., & Herlambang, A. D. (2018). Analisis Kualitas Website Tribunnews . Com Menggunakan Metode Webqual Dan Importance Performance Analysis. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 2(4), 1483–1491.
- Bear, G. (1970). THE CITY. In *Readings In Arab Middle Eastern Societies And Cultures* (Pp. 619–642). DE GRUYTER. <https://doi.org/10.1515/9783110815740.619>
- Béland, D. (2016). Kingdon Reconsidered: Ideas, Interests And Institutions In Comparative Policy Analysis. *Journal Of Comparative Policy Analysis: Research And Practice*, 18(3), 228–242. <https://doi.org/10.1080/13876988.2015.1029770>
- Benford, R. D. (1988). Ideology, Frame Resonance, And Participant. In *Mobilization: An International Journal* (Vol. 1, Pp. 197–217).
- Birkland, T. A. (2019). *An Introduction To The Policy Process*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781351023948>

- Blair, B. D., & McCormack, L. (2016). Applying The Narrative Policy Framework To The Issues Surrounding Hydraulic Fracturing Within The News Media: A Research Note. *Research And Politics*, 3(1), 22–24. <https://doi.org/10.1177/2053168016628334>
- Bowen, G. (2017). *Document Analysis As A Qualitative Research Method*. August 2009. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Boykoff, M. T., & Boykoff, J. M. (2007). Climate Change And Journalistic Norms: A Case-Study Of US Mass-Media Coverage. *Geoforum*, 38(6), 1190–1204. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2007.01.008>
- BPS. (2024). *Profil Kemiskinan Di Kota Palembang Maret 2024*. <https://palembangkota.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/16/1212/profil-kemiskinan-di-kota-palembang-maret-2024.html>
- Bradshaw, A. (1976). A Critique Of Steven Lukes’ ‘Power: A Radical View.’ *Sociology*, 10(1), 121–127. <https://doi.org/10.1177/003803857601000109>
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2006). The Design And Implementation Of Cross-Sector Collaborations: Propositions From The Literature. *Public Administration Review*, 66(SUPPL. 1), 44–55. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00665.x>
- Cairney, P. (2012). *Understanding Public Policy Theories And Issues*. PALGRAVE MACMILLA.
- Canon, H. J., & Cooper, T. L. (2000). The Responsible Administrator: An Approach To Ethics For The Administrative Role. *The Journal Of Higher Education*, 71(6), 749. <https://doi.org/10.2307/2649163>
- Charles Marsh And Daniel P. Rhodes, S. T. (2019). *CAN I GET A WITNESS?* Wm. B. Eerdmans Publishing Co.

- Christopher M. Weible, P. A. S. (Ed.). (2018). *THEORIES OF THE POLICY PROCESS* (Fourth). Taylor & Francis.
- Coleman, W. D. (2015). Policy Networks. In *International Encyclopedia Of The Social & Behavioral Sciences: Second Edition* (Second Edi, Vol. 18). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.75038-0>
- Cook, B. J. (2010). Arenas Of Power In Climate Change Policymaking. *Policy Studies Journal*, 38(3), 465–486. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2010.00370.x>
- Couture, F. (2005). *Encyclopedia Of Public Administration And Public Policy* (Vol. 22). <https://doi.org/10.1016/j.giq.2005.04.001>
- Creswell, J. W. (2007). QUALITATIVE INQUIRY & RESEARCH DESIGN Choosing Among Five Approach. In *Public Administration* (Vol. 77, Issue 4, Pp. 731–751). Sage Publication, Inc. <https://doi.org/10.1111/1467-9299.00177>
- Crow, D. A., & Lawlor, A. (2016a). Media In The Policy Process: Using Framing And Narratives To Understand Policy Influences. *Review Of Policy Research*, 33(5), 472–491. <https://doi.org/10.1111/ropr.12187>
- Dimmera, B. G., & Purnasari, P. D. P. (2020a). Permasalahan Dan Solusi Program Indonesia Pintar Dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Di Kabupaten Bengkayang. *Sebatik*, 24(2), 307–314. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v24i2.1137>
- Domhoff, G. W. (2005b). Power Structure Research And The Hope For Democracy. *Who Rules America*, April, 1–15.
- Dowding, K. (2006). Three-Dimensional Power: A Discussion Of Steven Lukes' Power: A Radical View. *Political Studies Review*, 4(2), 136–145. <https://doi.org/10.1111/j.1478-9299.2006.000100.x>

- Dryzek, J. S. (2004). Fischer, Frank, Reframing Public Policy: Discursive Politics And Deliberative Practices. *Policy Sciences*, 37(1), 89–93. <https://doi.org/10.1023/B:OLIC.0000035505.23131.80>
- Dryzek, J. S. (2009). Policy Analysis As Critique. *The Oxford Handbook Of Public Policy*. <https://doi.org/10.1093/Oxfordhb/9780199548453.003.0009>
- Dunn, W. N. (2018). *Urban Growth And Access To Opportunities: A Challenge For Latin America*. Panamericana Formas E Impresos S.A.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy*. Prentice Hall.
- Edwards, P. (2006). Power And Ideology In The Workplace: Going Beyond Even The Second Version Of The Three-Dimensional View. *Work, Employment And Society*, 20(3), 571–581. <https://doi.org/10.1177/0950017006067015>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework For Collaborative Governance. *Journal Of Public Administration Research And Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/Jopart/Mur011>
- Entman, R. M. (1993). *Framing : Toward Clarification Of A Fractured Paradigm*. 43(4).
- Entman, R. M. (2015). *DEMOCRACY WITHOUT CITIZENS: Media And The Decay Of American Politics*. Oxford University Press.
- Ertas, N., & Mcknight, A. N. (2020a). A Narrative Policy Framework Analysis Of Charter School Editorials In Local Media. *Critical Questions In Education*, 11(1), 1–20.
- Firmansyah, D., & Dede. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum Dalam Metodologi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), 85–114.
- Fischer, F. (1993). *The Argumentative Turn In Policy Analysis*. April. <https://doi.org/10.2307/2083102>

- Fisher, W. R. (1984). Narration As A Human Communication Paradigm: The Case Of Public Moral Argument. *Communication Monographs*, 51(1), 1–22. <https://doi.org/10.1080/03637758409390180>
- Foucault, M. (1973). The Archaeology Of Knowledge. (Tavistock Publication Limited London, 1973)., 135–140.
- Frederickson, H. G., Smith, K. B., Larimer, C. W., & Licari, M. J. (2018). *The Public Administration Theory Primer*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429494369>
- Freeman, M. (2017). *MODES OF THINKING FOR QUALITATIVE DATA ANALYSIS*. Routledge, Taylor & Francis.
- Gaventa, J. (2006). Finding_Spaces_For_Change. *IDS Bulletin*, 37(6), 23–33.
- Goffman, E. (1974a). *Frame Analysis: An Essay On The Organization Of Experience* (Vol. 132, Issue 10). Northeast University Press. <https://doi.org/10.1176/Ajp.132.10.1093-A>
- Goodnow, F. J. (1902). Colonial Government, By Paul S. Reinsch ; British Rule And Jurisdiction Beyond The Seas, By Henry Jenkyns, Courtenay Ilbert ; Dix Années De Politique Coloniale, By J. Chailley-Bert. *Political Science Quarterly*, 17(3), 523–526. <https://doi.org/10.2307/2140543>
- Gray, G., & Jones, M. D. (2016). A Qualitative Narrative Policy Framework? Examining The Policy Narratives Of US Campaign Finance Regulatory Reform. *Public Policy And Administration*, 31(3), 193–220. <https://doi.org/10.1177/0952076715623356>
- Groarke, M. (1993). An Examination Of Steven Lukes: Power, Agency And Structure: An Examination Of Steven Lukes. *New Political Science*, 14(1), 31–46. <https://doi.org/10.1080/07393149308429698>

- Gutama, A. S., Fedryansyah, M., & Nuriyah, E. (2021). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (Kip) Berdasarkan Basis Nilai Keadilan Dalam Kebijakan Implementation Of The Kartu Indonesia Pintar (Kip) Based On The Value Basis Of Justice In Social Policy. 2(3).
- Haugaard, M. (2008a). Sociological Lukes Versus Moral Lukes: Reflections Upon The Second Edition Of Power: A Radical View By Steven Lukes. *Journal Of Power*, 1(1), 99–106. <https://doi.org/10.1080/17540290801943471>
- Haywarda, C., & Lukesb, S. (2008). Nobody To Shoot? Power, Structure, And Agency: A Dialogue. *Journal Of Power*, 1(1), 5–20. <https://doi.org/10.1080/17540290801943364>
- Herlambang, P., & Udara, A. A. (2022). Strategi Pemerintah Daerah Guna Mewujudkan Nilai-Nilai Multikulturalisme Dalam Perspektif Ketahanan Wilayah (Studi Kasus Di Daerah Istimewa Yogyakarta) Local Government Strategy To Realize Multiculturalism Values In. 4(September), 242–265.
- Herweg, N., Zahariadis, N., & Zohlnhöfer, R. (2018). The Multiple Streams Framework: Foundations, Refinements, And Empirical Applications. In *Theories Of The Policy Process* (Pp. 17–53). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429494284-2>
- Holbo, J. (2007). *Framing Theory's Empire*.
- Hondeghem, A., & Vandenabeele, W. (2007). New Public Service. In *Encyclopedia Of Public Administration And Public Policy, Second Edition (Print Version)* (Pp. 1326–1330). CRC Press. <https://doi.org/10.1201/NOE1420052756.Ch268>
- Hood, C. (1990). Book Reviews Of Rediscovering Institution: The Organizational Basis Of Politics By March & Olsen. *Development In Practice*, 7(1), 97–101. <http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09614529754819>

- Hunter, F. (1953a). Community Power Structure: A Study Of Decision Makers. *University Of North Carolina Press.*, D, 1–19. [Http://Observatory-Elites.Org/Wp-Content/Uploads/2012/06/Power-Structure-Research-.Pdf](http://Observatory-Elites.Org/Wp-Content/Uploads/2012/06/Power-Structure-Research-.Pdf)
- Indonesia Corruption Watch. (2018). *Hasil Survey Exclusion Error Program Indonesia Pintar Jokowi-JK*. [Https://Www.Antikorupsi.Org/Sites/Default/Files/Hasil_Survey_Kartu_Indonesia_Pintar.Pdf](https://www.Antikorupsi.Org/Sites/Default/Files/Hasil_Survey_Kartu_Indonesia_Pintar.Pdf)
- Jember, U. I. (2023). Analisis Framing Media Indonesia . Com Dan Detik . Com Dalam Isu Endorse Jokowi Pada Prabowo Subianto. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1, 141–156.
- Jenkins, J. C., & Gaventa, J. (1982a). Power And Powerlessness: Quiescence And Rebellion In An Appalachian Valley. *Contemporary Sociology*, 11(3), 315. [Https://Doi.Org/10.2307/2067130](https://doi.org/10.2307/2067130)
- Jones, M. D., & Mcbeth, M. K. (2010). From The Selectedworks Of Michael D. Jones Narrative Policy Framework: Clear Enough To Be Wrong? A Narrative Policy Framework: Clear Enough To Be Wrong?P Sj_364 329..354. *Policy Studies Journal*, 38(2), 329–353. [Http://Works.Bepress.Com/Mjones/3](http://Works.Bepress.Com/Mjones/3)
- Jones, M. D., & Mcbeth, M. K. (2020). Narrative In The Time Of Trump: Is The Narrative Policy Framework Good Enough To Be Relevant? *Administrative Theory And Praxis*, 42(2), 91–110. [Https://Doi.Org/10.1080/10841806.2020.1750211](https://doi.org/10.1080/10841806.2020.1750211)
- Jones, M. D., Mcbeth, M. K., & Shanahan, E. A. (2014). Introducing The Narrative Policy Framework. *The Science Of Stories: Applications Of The Narrative Policy Framework In Public Policy Analysis*, 1–25. [Https://Doi.Org/10.1057/9781137485861](https://doi.org/10.1057/9781137485861)

- Jones, M. D., & Radaelli, C. M. (2015). The Narrative Policy Framework: Child Or Monster? *Critical Policy Studies*, 9(3), 339–355. <https://doi.org/10.1080/19460171.2015.1053959>
- Jungrav, G.-N. (2020). Narrative Policy Framework: Public Policy As A Fight Of Stories Abstract. *The Science Of Stories*, 2(2). <https://doi.org/10.1057/9781137485861.0016>
- Jungrav-Gieorgica, N. (2020). Narrative Policy Framework – Public Policy As A Battle Of Narratives Narrative Policy Framework – Public Policy As A Battle Of Narratives. *Researchgate*, 2013.
- Junius Lengkong, J. S., Pontoh, S., Kaparang, M., & Nomel Kumajas, V. (2024a). Evaluasi Program Indonesia Pintar Sebagai Kebijakan Peningkatan Kesetaraan Pendidikan Dan Kurikulum. *Journal On Education*, 6(4), 18587–18597. <https://doi.org/10.31004/Joe.V6i4.5821>
- Kapucu, N., Yuldashev, F., & Bakiev, E. (2009). Collaborative Public Management And Collaborative Governance : Conceptual Similarities And Differences. *European Journal Of Economic And Political Studies*, 2(1), 39– 60.
- Kelly, J. T. (2012a). *Framing Democracy A BEHAVIORAL APPROACH TO DEMOCRATIC THEORY* (Vol. 16, Issue 1). Princeton University Press.
- Kemdikbud. (2018). *Kajian Program Indonesia Pintar (Pip): Strategi Penjangkauan Anak Tidak Sekolah (Ats) Untuk Mengikuti Pendidikan Melalui Program Indonesia Pintar (Pip)*.
- Kemdikbud. (2020). Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035. *Kemdikbud*, 1–74.
- Kemdikbud RI. (2020). Neraca Pendidikan Daerah. In *Kemdikbud RI* (Issue 76).

- Kemendikbud. (2020). *Peta Jalan Pendidikan Indonesia Tahun 2020-2035*.
https://eng.unila.ac.id/wp-content/uploads/2020/06/5.A-Peta-Jalan-Sistem-Pendidikan-2020-2035_Kemendikbud.Pdf
- Kementerian PPN/BAPPENAS. (2021). *Laporan Kinerja Kementerian BPN/BAPENAS TA 2020*.
[https://ppid.bappenas.go.id/public/storage/post_pdf/lakip/\(PEMUTAKHIRAN\)%20LAPORAN%20KINERJA%20KEMENTERIAN%202020%20-%20Copy.Pdf](https://ppid.bappenas.go.id/public/storage/post_pdf/lakip/(PEMUTAKHIRAN)%20LAPORAN%20KINERJA%20KEMENTERIAN%202020%20-%20Copy.Pdf)
- Kementerian Keuangan. (2023). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 (Audited)*.
- Kencana, W. H., Situmeang, I. V. O., & Januar, K. (2022). Penggunaan Media Sosial Dalam Portal Berita Online. *Jurnal IKRAITH-HUMANIORA*, 6(2), 136–145.
- Keuangan, K. (2023). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2022. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 425.
- Kickert, W., Klijn, E.-H., & Koppenjan, J. (1997). *Managing Complex Networks: Strategies For The Public Sector*. SAGE Publications Ltd.
<https://doi.org/10.4135/9781446217658>
- Kingdon, J. W. (2010). *Agendas, Alternatives, And Public Policies, Update Edition, With An Epilogue On Health Care*.
- Klijn, E. H., & Koppenjan, J. (2016). *Governance Networks In*. Routledge Taylor & Francis Group.
- Klijn, E., & Koppenjan, J. F. M. (2014). Public Management And Policy Networks : The Theoretical Foundation Of The Network Approach To Governance Erik-Hans. *Public Management, Vol. 2, Nr. 2. (Pp. 135-158) (Issn 1461-667X)*, 2(2).

- Klijn, E.-H. (2008). Complexity Theory And Public Administration: What's New? *Public Management Review*, 10(3), 299–317. <https://doi.org/10.1080/14719030802002675>
- Koliba, C., Meek, J. W., & Zia, A. (2017). *Governance Networks In Public Administration And Public Policy*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315093451>
- Kusuma, S. A., Purnama, C., & Darmawan, W. B. (2020). Diplomasi Publik Dan Media: Penggunaan Jaringan Penyiaran Al-Jazeera Dalam Krisis Diplomatik Qatar 2017-2019. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(2), 141–168.
- Lakoff, G. (2004). *Don't Think Of An Elephant! Know Your Values And Frame The Debate*. University Of Chicago Press.
- Levinson, B. A. U., Sutton, M., & Winstead, T. (2009). Education Policy As A Practice Of Power: Theoretical Tools, Ethnographic Methods, Democratic Options. *Educational Policy*, 23(6), 767–795. <https://doi.org/10.1177/0895904808320676>
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2016). *Ensiklopedia Teori Komunikasi Jilid 1*. Kencana.
- Livernash, E. R. (1963a). The Relation Of Power To The Structure And Process Of Collective Bargaining. *The Journal Of Law And Economics*, 6, 10–40. <https://doi.org/10.1086/466590>
- Lukes J. Allen, Steven. W. (1974). Power: A Radical View. In *Contemporary Sociology* (Second Edi, Vol. 9, Issue 1). Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.2307/2065624>
- Lukes, S. (2005). *POWER ARADICAL VIEW*. Palgrave Macmillan.
- Lukes, S. (2006a). In Conversation With Steven Lukes. *Public Policy Research*, 13(4), 272–275. <https://doi.org/10.1111/J.1070-3535.2006.00453.X>

- Lukes, Steven. Whitt, J. A. (1974). Power: A Radical View. In *Contemporary Sociology* (Second Edi, Vol. 9, Issue 1). Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.2307/2065624>
- Lyon, M. A. (2021a). Heroes, Villains, Or Something In Between? How “Right To Work” Policies Affect Teachers, Students, And Education Policymaking. *Economics Of Education Review*, 82, 102105. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2021.102105>
- Marisa Faggini, C. P. V. (Ed.). (2010). *Decision Theory And Choices: A Complexity Approach*. Springer-Verlag.
- Maxwell, J. A. (2013). *Qualitative Research Design*. SAGE Publications, Inc.
- Mcbeth, M. K., & Pearsall, C. A. (2021a). Using The Narrative Policy Framework In The Teaching Of Introduction To Politics. *Journal Of Political Science Education*, 17(S1), 880–896. <https://doi.org/10.1080/15512169.2019.1682594>
- Mcbeth, M. K., Shanahan, E. A., Anderson, M. C. A., & Rose, B. (2012). Policy Story Or Gory Story? Narrative Policy Framework Analysis Of Buffalo Field Campaign’s Youtube Videos. *Policy And Internet*, 4(3–4), 159–183. <https://doi.org/10.1002/Poi3.15>
- Mccombs, M., & Shaw, D. (1972). The Agenda-Setting Function Of Mass Media. *Agenda Setting: Readings On Media, Public Opinion, And Policymaking*, 17–26. <https://doi.org/10.4324/9781315538389>
- Merry, M. K. (2016). Constructing Policy Narratives In 140 Characters Or Less: The Case Of Gun Policy Organizations. *Policy Studies Journal*, 44(4), 373–395. <https://doi.org/10.1111/Psj.12142>
- Merton, R. K. (1968). *Social Theory And Social Structure*. Macmillan Publishing Co., Inc.

- Michael Howlett, M. R. (2003). *Studying Public Policy: Policy Cycles And Policy Subsystem* (Vol. 444). Oxford University Press.
- MK. (2009). RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 3.
- Monarcha-Matlak, A. (2021). Automated Decision-Making In Public Administration. *Procedia Computer Science*, 192, 2077–2084. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.08.215>
- Nafisatur, M. (2024). Metode Pengumpulan Data Penelitian. *Metode Pengumpulan Data Penelitian*, 3(5), 5423–5443.
- Nagel, M., & Kenis, P. (2020). Politische Komplexität, Governance Von Innovationen Und Policy-Netzwerke. In *Politische Komplexität, Governance Von Innovationen Und Policy-Netzwerke*. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-30914-5>
- Naura Ifika Ramadhanti, Sunarto, P. Q. A. (2023). IMPLEMENTASI JURNALISME KONSTRUKTIF PADA ARTIKEL BERITA MEDIA ONLINE DI INDONESIA Naura Ifika Ramadhanti , Sunarto , Primada Qurrota Ayun Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jl . Prof . Soedarto ,. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, 3(1).
- Neto, D. D. R., & Barcelos, M. (2020). Stories In The Agenda: A Narrative Policy Framework Study. *Revista De Administracao Publica*, 54(6), 1632–1653. <https://doi.org/10.1590/0034-761220190395x>
- Nikmah, F. A., Wardani, N. T., & Matsani, N. (2020). Apakah Kartu Indonesia Pintar Berhasil Menurunkan Angka Putus Sekolah? *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 4(2), 72. <https://doi.org/10.32585/jkp.v4i2.581>
- Ninik Rahayu, M. A. D. (2023). *Jurnal Dewan Pers*. 26.

- O'Donovan, K. T. (2018a). Does The Narrative Policy Framework Apply To Local Policy Issues? *Politics & Policy*, 46(4), 532–570. <https://doi.org/10.1111/Polp.12265>
- OECD. (2019). *PISA 2018 Results (Volume I)*. OECD. <https://doi.org/10.1787/5f07c754-en>
- Oktalia, N., & Rusdi, F. (2021). Strategi Redaksi Media Online Okezone . Com Dalam Menarik Minat Generasi Milenial. *Koneksi*, 5(1), 37–41.
- Olofsson, K. L., Weible, C. M., Heikkila, T., & Martel, J. C. (2018). Using Nonprofit Narratives And News Media Framing To Depict Air Pollution In Delhi, India. *Environmental Communication*, 12(7), 956–972. <https://doi.org/10.1080/17524032.2017.1309442>
- Ozturk, M. (2022). *Educational Response, Inclusion And Empowerment For Sdgs In Emerging Economies*. Springer.
- Patton, C., Sawicki, D., & Clark, J. (2015). *Basic Methods Of Policy Analysis And Planning* -- Pearson Etext. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315664736>
- Patton, C. V., Sawicki, D. S., & Clark, J. J. (2016). Basic Methods Of Policy Analysis And Planning. In *Basic Methods Of Policy Analysis And Planning*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315664736>
- Peterson, H. L., Mcbeth, M. K., & Jones, M. D. (2020). Policy Process Theory For Rural Studies: Navigating Context And Generalization In Rural Policy. *Politics And Policy*, 48(4), 576–617. <https://doi.org/10.1111/Polp.12366>
- Pressman, W. (2005a). Implementation In The Public Sector, Past, Present And Future. *Canadian Public Administration*, 48(2), 268–273. <https://doi.org/10.1111/J.1754-7121.2005.Tb02191.X>

- Provan, K. G., & Kenis, P. (2008). Modes Of Network Governance: Structure, Management, And Effectiveness. *Journal Of Public Administration Research And Theory*, 18(2), 229–252. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum015>
- Pusdatin Kesos. (2022). *Laporan Kinerja Pusdatin Kesos*. <https://kemensos.go.id/uploads/topics/16931961038791.pdf#page=7.05>
- Ramesh, Michael Howlett, M. (2003). *STUDYING PUBLIC POLICY Policy Cycles And Policy Subsystem*. Oxford University Press.
- Reese, S. D., Gandy, O. H., & Grant, A. (2008). FRAMING PUBLIC LIFE Perspectives On Media And Our Understanding Of The Social World. In *Framing Public Life*. Lawrence Erlbaum Associates, Inc. <https://doi.org/10.4324/9781410605689-16>
- Retnaningsih, H. (2017). Program Indonesia Pintar: Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Bidang Pendidikan (Studi Di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Dan Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Aspirasi*, 8(2), 161–177.
- Retnaningsih, H. (2019). Program Indonesia Pintar: Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Bidang Pendidikan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 8(2), 161–177. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v8i2.1263>
- Rhodes, R. A. W. (2007). Understanding Governance: Policy Network, Governance, Reflexity And Accountability. *Organization Studies*, 28(8), 1243–1264. <https://doi.org/10.1177/0170840607076586>
- Rini, P. P., Muhyidin, A., & Atikah, C. (2024). Peran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Dalam Meningkatkan Kesenjangan Pendidikan Tinggi (Studi Kasus Universitas Salakanagara). 6(2), 119–126.

- Rohaeni, N. E., & Saryono, O. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *Journal Of Education Management And Administration Review*, 2(1), 193–204.
- Rohi, R. (2020). Relasi Kuasa Dalam Demokrasi Indonesia. *Media Komunikasi FPIPS*, 23, 206–218.
- Sabatier, P., & Mazmanian, D. (1980). Conceptual Framework, The Implementation Of Public Policy : A Framework Of Analysis, Universitas Of California And Pomona College. *Policy Studies Journal*, 8(4), 538–560.
- Sari, I., & Suswanta. (2023). Narrative Policy Framework: Indonesia's Capital City Relocation Policy. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 27(1), 80–92.
- Sari, T. D. (2019). Sikap Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Kip Di Kampung Lebak Manis Kota Bandar Lampung. *Pendidikan*.
- Satrianawati, S., & Fu, W. H. (2019). Education For Sustainable Development (ESD) In Indonesia: A Conceptual Framework. *International Journal Of Education And Learning*, 1(1), 42–49.
<https://doi.org/10.31763/Ijele.V1i1.33>
- Scharpf, F. W. (1997). *Games Real Actors Play : Actor-Centered Institutionalism In Policy Research*. Westview Press.
- Scheufele, D. A., & Tewksbury, D. (2007). *Framing , Agenda Setting , And Priming : The Evolution Of Three Media Effects Models*. 57, 9–20.
<https://doi.org/10.1111/J.1460-2466.2006.00326.X>
- Schneider, A., & Ingram, H. (2005). Deserving And Entitled: Social Constructions And Public Policy. *Deserving And Entitled: Social Constructions And Public Policy*, 1–371.
- Searle, J. R. (2015). *The Construction Of Social Reality*. Amazon Noir.

- Shah, A. (2005). *PUBLIC SERVICES DELIVERY*.
- Shanahan, E. A. (2018). How To Conduct A Narrative Policy Framework Study. *Social Science Journal*, 55(3), 332–345. <https://doi.org/10.1016/J.Soscij.2017.12.002>
- Shanahan, E. A., Jones, M. D., & Mcbeth, M. K. (2011). Policy Narratives And Policy Processes. *Policy Studies Journal*, 39(3), 535–561. <https://doi.org/10.1111/J.1541-0072.2011.00420.X>
- Shanahan, E. A., Jones, M. D., & Mcbeth, M. K. (2018). How To Conduct A Narrative Policy Framework Study. *Social Science Journal*, 55(3), 332–345. <https://doi.org/10.1016/J.Soscij.2017.12.002>
- Shanahan, E. A., Jones, M. D., Mcbeth, M. K., & Radaelli, C. M. (2018). The Narrative Policy Framework. In *Theories Of The Policy Process, Fourth Edition* (Issue May). <https://doi.org/10.4324/9780429494284-5>
- Shanahan, E. A., Mcbeth, M. K., & Hathaway, P. L. (2011). Narrative Policy Framework: The Influence Of Media Policy Narratives On Public Opinion. *Politics And Policy*, 39(3), 373–400. <https://doi.org/10.1111/J.1747-1346.2011.00295.X>
- Shanahan, E., Jones, M. D., & Mcbeth, M. K. (2016). Policy Analysis: Narrative Policy Framework. *Encyclopedia Of Public Administration And Public Policy, Third Edition*, 1–7. <https://doi.org/10.1081/E-Epap3-120053656>
- Sjoberg, L. (2010). *Gender And International Security : Feminist Perspectives* (1st Ed.). Routledge.
- Smith-Walter, A., Jones, M. D., Shanahan, E. A., & Peterson, H. (2020). The Stories Groups Tell: Campaign Finance Reform And The Narrative Networks Of Cultural Cognition. In *Quality And Quantity* (Vol. 54, Issue 2). Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/S11135-019-00884-8>

Stankevich, A. (2016). *Title: Decision-Making Process*.

Stephen D. Reese, Oscar H. Gandy, Jr, A. E. G. (2008). FRAMING PUBLIC LIFE Perspectives On Media And Our Understanding Of The Social World. In *Framing Public Life*. Lawrence Erlbaum Associates, Inc. <https://doi.org/10.4324/9781410605689-16>

Steven Lukes. (2005). *POWER ARADICAL VIEW*. Palgrave Macmillan.

Supardi, S., Widodo, S., & Thamrin, M. H. (2023). Jurnal Ilmu Administrasi Narrative Policy Framework In The Academic Field : A Bibliometric Examination. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 20(2), 156–168.

Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). Estimating The Impact Of Covid-19 On Poverty In Indonesia. *Bulletin Of Indonesian Economic Studies*, August, 175–192. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1779390>

Syukri, A., Al-Hamdi, R., Suswanta, S., & Kurniawan, D. (2023). Narrative Policy Framework: Analysis Of Policy Discourse For The Three-Term Presidential Term. *Journal Of Government And Civil Society*, 7(2), 242. <https://doi.org/10.31000/Jgcs.V7i2.5880>

Taufik. (2017). Studi Jaringan Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Publik. *AL-IJTIMA`I-International Journal Of Government And Social Science*, 2(2), 219–234.

Terlizzi, A. (2021). Narratives In Power And Policy Design: The Case Of Border Management And External Migration Controls In Italy. In *Policy Sciences* (Vol. 54, Issue 4). Springer US. <https://doi.org/10.1007/S11077-021-09440-4>

- Tjahyo Rawinarso, Suhud Alynudin, Agus Widiarto, Haryo Setyoko, Najwa Shafira, T. (2024). Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Tahun 2021-202. *Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Tahun 2021-2022*, 16(1), 27–42.
- Toledo, P. (2005). Classic Realism And The Balance Of Power Theory. *Glendon Journal Of International Studies*, 4, 52–63.
- Tristia, O. (1998). Indonesia Case Study: Situation Analysis On The Effects Of And Responses To COVID-19 On The Education Sector In Asia. In *Property Tax Reform In Developing Countries*. UNICEF. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-5667-1_5
- Turpin, S. M. (2004). Decision-Making : Theory And Practice. *Centre For Logistics And Decision Support*, 20(2), 143–160.
- Unit Riset Sekretariat TNP2K. (2022). Pemeringkatan Kesejahteraan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). *TNP2K*.
- Vasavada, T. (2011). Book Review: Social Equity And Public Administration: Origins, Developments, And Applications. *The American Review Of Public Administration*, 41(5), 592–594. <https://doi.org/10.1177/0275074011400405>
- Vasquez, G. M. (2009). Symbolic Convergence Theory And Grunig ' S Situational Theory Of Publics A Homo Narrans Paradigm For Public Relations : Combining - ~ Ormann ' S Symbolic Convergence Theory And Grunig ' S Situational Theory Of Publics. *Convergence*, 5(921663939), 37–41. <https://doi.org/10.1207/S1532754xjpr0503>

- Wahyusuci, H., Haris, A., & Jamil, B. (2022). Persepsi Masyarakat Tentang Judul Berita Clickbait Pada Media Kumparan . Com Pada Masyarakat Kelurahan Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Community Perception About Clickbait News Title On Kumparan . Com Media On The Village Community Of Lama Village , Pancu. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 4(1), 44–51. <https://doi.org/10.31289/jipikom.V4i1.1150>
- Weible, C. (2017). *Introduction: The Scope And Focus Of Policy Process Research And Theory*. Taylor & Francis.
- Weiss, J. A., Osborne, D., Gaebler, T., & Review, N. P. (1995). Reinventing Government: How The Entrepreneurial Spirit Is Transforming The Public Sector. *The Academy Of Management Review*, 20(1), 229. <https://doi.org/10.2307/258896>
- Wicaksana, R. H., Munandar, A. I., & ... (2020). Studi Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Dengan Narrative Policy Framework: Kasus Serangan Siber Selama Pandemi COVID-19 A Narrative Policy *Jurnal IPTEK-KOM ...*, 22(2), 143–158.
- Wilhelm, M., Zolg, D. P., Graber, M., Gessulat, S., Schmidt, T., Schnatbaum, K., Schwencke-Westphal, C., Seifert, P., De Andrade Krätzig, N., Zerweck, J., Knaute, T., Bräunlein, E., Samaras, P., Lautenbacher, L., Klaeger, S., Wenschuh, H., Rad, R., Delanghe, B., Huhmer, A., ... Kuster, B. (2021). Deep Learning Boosts Sensitivity Of Mass Spectrometry-Based Immunopectidomics. *Nature Communications*, 12(1), 3346. <https://doi.org/10.1038/S41467-021-23713-9>
- Woodrow, R. B. (1983). Effective Policy Implementation By Daniel A . Mazmanian ; Paul A . Sabatier. Review. *Social Indicators Rsearch*, 12(2), 223–224.

- Yin, Y. (2020). Characteristics Of Social Governing Organizations And Governance Of Emergent Public Security Events From The Perspective Of Public Safety. *Revista De Cercetare Si Interventie Sociala*, 69, 241–260. <https://doi.org/10.33788/Rcis.69.15>
- Young, R. A. (1978). 1978 - Steven Lukes's Radical View Of Power By Young. 57(1963).
- Zakso, A. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 13(2), 916. <https://doi.org/10.26418/J-Psh.V13i2.65142>
- Zamjani, I. (2019). Inklusivitas Program Indonesia Pintar: Studi Kasus Pelaksanaannya Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Lima Daerah. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 4(1), 15–32. <https://doi.org/10.24832/Jpnk.V4i1.1095>
- Zamjani, I., Sutrisno, A. N., Vergustina, D. N., Maulana, T., Rachmat, H., Dewi, F. K., & Handayani, M. (2023). *Sekolah Tangguh Indonesia Laporan Rapor Pendidikan Tahun 2023*.